

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan *competitiveness index*, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Walaupun demikian, dalam menghadapi MEA Indonesia telah menerapkan beberapa program dan kebijakan agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di ASEAN.

Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Agenda *Nawa Cita* merupakan salah satu nilai tambah bagi Indonesia. Program-program *Nawa Cita* bila dapat diaplikasikan dengan baik akan turut meningkatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia. Ditambah lagi dengan keberadaan proyek-proyek strategis. Apabila sudah berjalan dengan baik, proyek-proyek tersebut dapat menjadi pilar utama Indonesia dalam pembangunan khususnya perekonomian.

Indonesia menghasilkan beberapa kebijakan dalam menyongsong MEA 2015. Mulai dari Impres Nomor 6 tahun 2014 yang berisikan peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA. Keppres no. 37 tahun 2014, yang isinya tentang pembuatan komite nasional untuk menghadapi MEA. UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yang isinya mencakup mulai dari perdagangan dalam negeri sampai dengan perdagangan jasa. Lalu ada Inpres nomor 1 tahun 2016 dan Perpres nomor 3 tahun 2016 yang isinya adalah percepatan proyek

strategis nasional, yang merupakan pembantu dari UU no.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Hal ini karena percepatan pembangunan proyek strategis merupakan pembangunan infrastruktur agar MEA dapat berjalan dengan lancar.

Relevansi kebijakan perdagangan Indonesia demi menyongsong MEA dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang ada. Namun yang disayangkan adalah keterlambatan pengeluaran kebijakan yang bersangkutan ini. Dapat dilihat pada pengeluaran kebijakan mengenai percepatan proyek strategis nasional. Seharusnya ini sudah dilaksanakan jauh sebelum tahun 2015, tetapi pada kenyataannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru keluar pada awal tahun 2016.

Peluang Indonesia untuk berkecimpung dalam MEA 2015 sangatlah besar. Dapat dilihat dari faktor alam yang sangat mendukung. Walaupun jika dilihat SDM yang tersedia belum cukup memadai. Pemerintah harus lebih berperan membantu masyarakat kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan untuk membangun pondasi-pondasi ekonomi yang baik dikalangan ekonomi kecil dan menengah.

## **5.2 Saran**

Fasilitas transportasi di Indonesia dapat dibilang kurang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Biaya transportasi yang cukup besar membuat sebuah produk lebih mahal. Ketika diwilayah perbatasan, terutama di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, banyak masyarakat

Indonesia yang harus membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia. Hal ini dikarenakan transportasi dari sisi Indonesia tidaklah memadai.

Pemerintah Indonesia harus lebih baik lagi dalam membuat suatu kebijakan dan memikirkan dampak kebijakan yang dibuat paling tidak untuk jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Kebijakan yang diambil pun harus lebih menguntungkan dan memproteksi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian Indonesia tidak akan direndahkan ataupun diremehkan oleh negara anggota ASEAN yang lain.

Dalam pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia harus dapat manajemen waktu pengeluaran UU dan memprioritaskan mana yang lebih mendesak untuk kemajuan dan aksi di arena internasional. Jangan membuat kebijakan ketika sebuah perjanjian terselenggara, tapi sebelum terselenggara seharusnya sudah ada UU yang mengatur dan sudah diterapkan. Terutama yang bentuknya adalah fasilitas pendukung program.

Sumber daya manusia Indonesia masih sangat dipertanyakan. Baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengembangan pendidikan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan ketika sebuah negara ingin berkembang dengan baik. Jika SDM sudah memadai maka dengan sendirinya pasti pengelolaan SDA yang dimiliki akan di proses sendiri dan tidak mengandalkan tenaga ahli dari luar. Dengan demikian pemasukan akan masuk kembali ke tanah air.